

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Fadhila *et al* (2017) melakukan penelitian mengenai komisaris independen sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis regresi panel data dengan tingkat signifikansi 5% pada objek perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia menggunakan *purposive sampling* pada periode observasi 2011-2014 dengan 11 sampel. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak efektif dalam melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan dan tidak dapat mempengaruhi kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak. Keberadaannya hanya untuk simbol dalam memenuhi peraturan Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Ariawan *et al* (2017) dan Yuliani (2019) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh negatif komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini pengambilan sampelnya menggunakan metode *purposive sampling*, pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen dan

perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi mampu membayar beban pajaknya dan menjaga nilai perusahaan di mata pemegang saham akan menyebabkan perusahaan meminimalkan perilaku *tax avoidance*.

Nugraheni (2018) melakukan penelitian mengenai kualitas audit sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan regresi data panel dengan signifikansi 5% pada objek perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 dan menggunakan sampel 8 perusahaan. Peneliti ini juga membahas bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance* secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik big four maupun Kantor Akuntan Publik non big four dalam melakukan audit laporan keuangan yang dapat disalah gunakan para pemegang saham untuk pencegahan *tax avoidance*. Pernyataan atau hasil penelitian tersebut dibenarkan oleh Yuiani (2017) yang juga mengatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dengan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh dari www.idx.co.id dalam bentuk laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Namun kedua pernyataan hasil penelitian keduanya tidak disetujui oleh Huda (2017) yang mengatakan bahwa nilai probabilitas X^2 yaitu variabel Kualitas Audit adalah ,0378 lebih kecil dibandingkan dengan α 5%, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

B. Tinjauan Pustaka

Teori Agency

Suatu konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan individu untuk mengevaluasi lingkungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang diambil. Hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak yaitu adanya konflik yang terjadi atas dasar kepentingan untuk meminimalisir pajak agar laba semakin meningkat.

Penghindaran pajak juga menjadi pemicu timbulnya permasalahan keagenan karena kepentingan dua pihak yang berbeda yaitu manajer mementingkan bonus atas kinerja yang baik, sedangkan pemilik sendiri menginginkan kekayaan yang melimpah melalui kinerja perusahaan. Jadi, untuk mengatasi permasalahan yang timbul, pemilik perusahaan mengajukan kompensasi kepada manajemen agar bekerja lebih baik untuk melakukan penghindaran pajak yang mempunyai pengaruh besar terhadap keuntungan perusahaan pajak (Masri dan Martani, 2012).

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada Ayat 1 Pasal 1 berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta dilakukan untuk kemakmuran bersama. Tujuannya seperti membiayai pengeluaran umum, menjadi pendorong untuk mencapai tujuan yang direncanakan, dan membeli keperluan produksi barang atau jasa untuk pemerintah mendistribusikan kepada warga. Selain itu, pajak juga mempunyai fungsi sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitasi.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu cara untuk menghindari beban pajak yang tidak dikehendaki, yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak dan mencari cela atau kelemahan peraturan. Adapun indikator penghindaran pajak yaitu wajib pajak berupaya membayar pajak sedikit dari jumlah yang seharusnya, dan berupaya menunda pembayaran pajak, serta berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan yang diperoleh seharusnya. Selain itu terdapat cara-cara penghindaran pajak yang biasa dilakukan wajib pajak yaitu menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak yuridis.

Komisaris Independen

Merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, maupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya atau pemegang saham. Adanya komisaris independen yaitu untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang obyektif dan profesionalitas. Selain itu Tugas komisaris independen yaitu untuk mengawasi pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab atas pemegang saham. Dalam Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa keberadaan komisaris independen ini minimal 30% dari jumlah dewan komisaris yang ada. (Sari *et al*, 2013).

Pernyataan 30% dari dewan komisaris yang ada tersebut sangat didukung oleh dalam peraturan BAPEPAM No: KEP – 315/BEJ/06 – 2000 agar pelaksanaan *good corporate governance* berjalan dengan baik dan mampu mengontrol, serta mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak.

Kualitas Audit

Elemen penting yang ada yaitu transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat diwujudkan dengan cara melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan pada

pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak terus menerus diwajibkan oleh pemegang saham (Sartoni, 2010).

Standar Pedoman Akuntan Publik (SPAP) adalah pedoman untuk mengatur standar umum pemeriksaan akuntan publik, mengatur hal yang berkaitan dengan penugasan, serta independensi sikap mental. Adapun standar dan prinsip kualitas auditor yaitu bersikap bebas tanpa memihak, patuh hukum, dan mentaati kode etik profesi. Kane dan Velury (2005) mengatakan kualitas audit sebagai kapasitas auditor eksternal untuk mengetahui terjadinya kesalahan material dan bentuk penyimpangan lainnya. Adapun definisi dari Russel (2000) kualitas audit adalah fungsi jaminan dimana kualitas tersebut akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011) menyebutkan bahwa pertimbangan auditor atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya harus didasarkan pada penilaian auditor yang berkualitas. Selama ini kualitas auditor dikaitkan dengan ukuran dan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP). Dimana, auditor melaporkan kesalahan dan kecurangan sistem akuntansi klien seperti salah saji material yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan yang tergantung pada independensinya.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen., anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta

bebeas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Tanggung jawab pokok komisaris independen adalah mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam pencapaiannya, dapat dilakukan pengawasan serta dukungan anggota dewan komisaris yang lain agar dapat menjalankan tugas pengawasan, pengarahan, serta memberi nasihat para direktur untuk mendapatkan nilai tambah bagi perusahaan tersebut.

Menurut Maharani dan Suardana (2014) menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur dengan hasil regresi sebesar -0,26 dengan tingkat signifikan 0,06 yang lebih kecil dari konstanta (0,05). Dapat ditarik kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dengan arti lain bahwa keberadaan dewan komisaris independen dikatakan efektif untuk mencegah tindakan penghindaran pajak.

H1: Menguji pengaruh komisaris independen terhadap Penghindaran Pajak

2. Pengaruh Kualitas Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit adalah ukuran pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk melakukan suatu kegiatan, mutu, dan hasil sesuai peraturan yang telah direncanakan. Setelah itu akan diimplementasikan secara efektif dengan tujuannya (Simanjuntak, 2008).

(Annisa dan Kurniasih, 2012) menguji pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance dengan hasil regresi secara statistik terbukti kualitas audit berpengaruh signifikan. Jika nominal pajak terlalu banyak yang dikeluarkan, maka akan berpotensi kegiatan penggelapan

pajak. Sedangkan jika semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka kecil potensi aktivitas manipulasi pajak.

H2: Menguji pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak

Kerangka Pemikiran:



